

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memenuhi hak dari setiap anak dalam memperoleh kesetaraan dalam pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif. Dijaminnya setiap individu siswa dalam memperoleh hak belajar harus menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan agar memberikan akomodasi yang optimal bagi semua peserta didik. Terbentuknya akomodasi berupa layanan dan bantuan aksesibilitas bagi semua peserta didik menjadi pilihan utama agar proses belajar dari siswa dapat memberikan hasil yang berarti bagi upaya pembangunan sumber daya manusia tidak terkecuali untuk siswa berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan (Sunanto, 2009, hlm. 78). Pendidikan inklusif memungkinkan semua anak bisa belajar bersama pada tempat yang sama dan diwaktu yang bersamaan pula. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai paradigma-paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal mendasar yang harus diketahui oleh banyak pihak termasuk orang tua dan guru adalah bahwasannya sekolah inklusif bukan hanya sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler.

Dalam pengembangan praktik-praktik inklusif di sekolah harus didasari untuk mengakomodir kebutuhan belajar semua peserta didik (Ainscow, 1999). Berdirinya sekolah inklusif otomatis akan berpengaruh banyak pada implikasi dalam sistem pendidikan yang akan dijalankan. Berbagai fakta yang bisa terlihat adalah adanya aksesibilitas baik berupa

aksesibilitas kurikulum, pembelajaran, bangunan dan lain sebagainya. Ketika melihat dalam bahasa yang lebih sederhana, sistem yang berjalan di Sekolah otomatis harus mampu mengakomodasi setiap keragaman siswa-siswanya. Titik utama yang dijadikan sudut pandang dalam pelayanan pendidikan inklusif adalah bagaimana setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal. Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik itu dalam setting pendidikan formal maupun non-formal (Alimin, 2011, Hlm. 71).

Promosi pendidikan inklusif kepada berbagai pihak diciptakan supaya memberikan kesan kebermaknaan baik kepada siswa, orang tua dan guru serta seluruh *stake holders*. Promosi tersebut dirasa akan bisa berjalan optimal dengan adanya kerjasama berbagai pihak yang mempunyai visi yang sama untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi setiap siswa. Pentingnya memahami filosofi dan konsep dari pendidikan khusus merupakan pondasi awal yang sangat vital. Hal tersebut dapat dilakukan guna meluruskan berbagai pandangan miring terkait pendidikan inklusif yang bisa berpotensi mengikis potensi kebermaknaan dari filosofi *education for all*. Terutama paradigma yang menganggap bahwa pendidikan inklusif adalah istilah lain dari pendidikan khusus, atau mulai bermunculnya sebutan untuk siswa berkebutuhan khusus sebagai siswa inklusi yang berpotensi mengikis makna filosofi dari *education for all*. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*School Improvement*) (Alimin, 2011). Penegasannya bisa diperoleh dari pernyataan Salamanca tahun 1994 yang berbunyi:

“Sekolah Seharusnya mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa atau kondisi-kondisi lain termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak didaerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnis dan bahasa minoritas yang tidak

beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat”. (Kustawan & Hermawan (2013, hlm 8)

Meluruskan konsep dan memperbarui paradigma sekolah untuk semua merupakan solusi dalam memperbaiki mutu pendidikan. Menurut Ainscow (2002) keterlaksanaan pendidikan Inklusif dapat dievaluasi menggunakan suatu indeks yang disebut *index for inclusion* yang mempunyai 3 pilar yaitu dimensi budaya, dimensi kebijakan dan dimensi praktik (Sunanto, 2009, hlm 79). Dalam ranah implementasinya, munculnya kesadaran dari berbagai elemen-elemen pendidikan dan pemerintah terkait pendidikan inklusif memiliki implikasi positif berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan proses keberjalanan pendidikan itu sendiri. Keberjalanan pihak sekolah yang kemudian ditunjuk pemerintah atau yang mendeklarasikan bahwa lembaga pendidikannya merupakan sekolah bersistem inklusif tidak akan berjalan dengan sendiri. Hal tersebut didasarkan atas konsep indeks inklusi dengan 3 dimensinya, yaitu (1) dimensi budaya yang terdiri atas seksi membangun komunitas dan seksi membangun nilai-nilai inklusif, (2) dimensi kebijakan terdiri atas seksi pengembangan tempat untuk semua dan seksi untuk dukungan keberagaman serta (3) dimensi praktik terdiri atas seksi belajar dan bermain bersama dan seksi mobilisasi sumber-sumber.

Dalam mengimplementasikan pendidikan Inklusif perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua (*Educational for All*). Perangkat hukum yang memadai sudah ada melalui Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif serta Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan, namun demikian persoalannya adalah ketersediaan guru-guru di sekolah reguler juga belum memiliki kompetensi yang diperlukan, demikian juga dengan sarana dan prasaranya. Kemudian terkhusus di Provinsi Jawa Barat lewat Pergub No 72 tahun 2013 memberikan regulasi terkait adanya Lembaga Dukungan Pendidikan (LDP)

atau Pusat Sumber (PS) yang juga disebut *Resource Center*. Sesuai dengan Pergub Jabar No 72 tahun 2013 *Resource Center* adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen serta memberikan dukungan kekuatan (*Supporting Power*) dan dukungan profesional (*Professional Support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagian anak berkebutuhan khusus.

Menanggapi regulasi yang ada, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lantas membentuk 3 *Resource Center* yang ada di Kota Bandung. *Resource Center* tersebut antara lain berada di SLB-N A Kota Bandung (*Resource Center Bandung*), SLB-N B Cicendo (*Resource Center Cicendo*) dan SLB C Sukapura (*Resource Center Sukapura*). *Resource Center Bandung* dan *Resource Center Sukapura* sudah dahulu dibentuk pada tahun 2011 sebagai *Resource Center Pendidikan Inklusif*. Kemudian pada tahun 2013 disusul *Resource Center Cicendo*.

Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif, pengertian dari *Resource Center* adalah lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan kebutuhan khusus/ pendidikan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam pendidikan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dan melatih berbagai keterampilan, serta memperoleh berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan khusus / pendidikan inklusif (Nurlina, 2012, hlm. 19). Keberadaan *Resource Center* biasanya menyatu dengan sekolah luar biasa yang ditunjuk khusus oleh pemerintah atau pihak terkait untuk menjadi *Resource Center*. Bahkan dengan adanya *Resource Center* ini sangat membantu dalam persebaran guru pendamping khusus yang otomatis sangat diperlukan oleh sekolah inklusif. Faktor-faktor seperti tidak adanya layanan dukungan, personil pendukung merupakan masalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif (Elweke & Rodda, 2011).

Fungsi dari *Resource Center* adalah sebagai pusat pendidikan dan layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, pusat asesmen, pusat

penyediaan sumber belajar, pusat penyediaan alat bantu belajar dan mengajar serta pusat penelitian dan pengembangan (Hidayat, 2013, hlm 32). Dalam teknisnya pusat sumber juga menyediakan layanan guru pendidikan kebutuhan khusus dan siap menjadi guru kunjung. Guru kunjung tersebut akan bekerja sama dengan guru sekolah reguler dalam fungsinya sebagai guru pendamping khusus bagi ABK. Fokus layanan dari *Resource Center* adalah (1) Pusat pelatihan dan keterampilan, (2) Pusat layanan asesmen, (3) Pusat pengembangan media, (4) Pusat bantuan layanan profesional, (5) Pusat Advokasi ABK dan Orang Tua (Amuda, 2005).

Sistem pendukung layanan pendidikan inklusif harus wajib dimiliki sebuah kota atau kabupaten. Dengan banyaknya jumlah sekolah yang didampingi, *Resource Center* tersebut juga harus menyesuaikan antara potensi sumber dayanya dengan pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan secara profesional. Secara konsep, seharusnya setiap Sekolah Luar Biasa memiliki fungsi sebagai *Supporting System* dengan terbentuknya *Resource Center* bagi sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif. Pada tataran praktiknya, ada *Resource Center* yang mampu mengelola dengan baik berbagai potensi sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan perannya. Akan tetapi dibalik *Resource Center* yang mampu tersebut, masih ada banyak SLB yang belum mampu melaksanakan perannya sebagai *Resource Center* dikarenakan berbagai faktor. Maka dari itu, *Resource Center* harus memiliki strategi dalam mengatur manajemen programnya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dan bisa berjalan efektif dan membantu dalam kelanjutan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Ainscow (2005, hlm. 10) memberikan pemaparan bahwa praktik pendidikan inklusif terdiri dari segala sesuatu yang dilakukan oleh individu dalam suatu komunitas, pemberdayaan sumber yang tersedia, dan penentuan tujuan bersama. Berkaitan dengan baiknya pengelolaan program *Resource Center* yang notabene adalah *supporting system*, maka tidak akan jauh-jauh dari kesuksesan strategi pada manajemennya dalam mengatur program-programnya. Dengan manajemen yang tertata dan pembagian tugas yang

jas, maka akan terjadi optimalisasi berkaitan dengan berbagai potensi sumber dayanya dan munculnya perilaku organisasi sebagai penunjang aktifitas keorganisasian lembaga. Faktor sumber daya manusia yang di tugaskan dalam mengemban tugas di *Resource Center* pada akhirnya yang akan menentukan arah kerja dan manajemen program lembaga. Faktor sumber daya manusia inilah yang pada nantinya akan sangat berpengaruh selain visi-misi dan perilaku organisasi yang ada. Dari studi awal yang dilakukan oleh penulis, SDM yang ada di *Resource Center* belum memiliki regulasi yang baku terkait *job desk* mereka. Realita yang terjadi adalah dikarenakan SDM merupakan guru di sekolah luar biasa yang merupakan perantara terbentuknya *Resource Center*, otomatis harus terbagi alokasi waktu antara jam mengajar di sekolah dengan tugas di *Resource Center*. Faktor tersebut diatas yang terkadang memberikan kesukaran dalam manajerialisasi peran di *Resource Center* yang di emban. Belum seimbangya pengaturan sumber daya manusia antara tugas di sekolah dengan tugas yang harus dilakukan di *Resource Center* menjadi titik permasalahan yang bisa berpotensi menghambat pengembangan program *Resource Center*.

Dalam mengembangkan manajemen program lembaga yang baik, maka sangat dibutuhkan pengetahuan yang memadai terkait fungsi dari manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (1978) meliputi antara lain, perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengawaasan (*Controlling*). Menurut Zainy (2016, hal. 37) pengelolaan atau manajemen adalah proses mengatur agar seluruh potensi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan yaitu melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen yang sudah diterapkan pada nantinya akan membentuk perilaku organisasi sebagai awal dari kesuksesan kinerja lembaga. Perilaku organisasi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara perilaku sumber daya manusia di dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja

organisasi ; baik secara kinerja individu, kinerja kelompok maupun kinerja organisasi. (Sumarsan, 2010, hlm 20).

Temuan lapangan oleh Nurtasila dkk (2018), bahwa sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif masih belum mengoptimalkan fungsi dan peran adanya *Resource Center* untuk membantu implementasi pendidikan inklusif di sekolahnya. Sekolah-sekolah tersebut memberikan keterangan bahwasannya masih banyak kebingungan dalam penyelenggaraan sistem inklusif dan minimnya tenaga pendidik sebagai GPK yang memiliki kompetensi dalam pendidikan kebutuhan khusus. Opsi pilihan yang dilakukan sekolah-sekolah tersebut adalah lebih memilih menghubungi sekolah lain yang mereka anggap memiliki dokumen-dokumen yang bisa ditiru untuk keperluan asesmen dll. Temuan tersebut sangat berharga untuk kemudian menjadi bukti bahwasannya masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam implementasi pendidikan inklusif. Akses informasi dan belum optimalnya sosialisasi serta komunikasi secara teknis di lapangan memberikan dampak yang besar dalam permasalahan ini.

Permasalahan akses informasi bagi masyarakat (*Stakeholders*) untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi dari *Resource Center* nampaknya menjadi perihal yang harus diperbaiki. Khusus di kota Bandung ada beberapa *Resource Center* yang nampaknya sudah mampu membuat program-program dan sudah mengaplikasikannya di lapangan. Dari pengamatan awal yang telah dilakukan, lembaga tersebut masih belum mampu mengelola dengan lebih optimal berbagai potensi akses informasi yang sebenarnya dapat membantu masyarakat mengakses *Resource Center* secara lebih mudah. Terkhusus di era digital ini bahwasannya sangat terbantu dengan adanya internet dan perangkat-perangkat yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat untuk mengakses. Kebutuhan akan pusat informasi berbasis internet pada realitanya berjalan berdampingan dengan pola hidup masyarakat yang sudah dengan mudah menggunakan system internet pada perangkat *smarthphone* atau komputer yang dimilikinya. Hal tersebut yang nampak harus dioptimalkan lembaga sebagai bentuk

perwajahan *online* lembaga dengan visinya sebagai *support system* implementasi pendidikan inklusif.

Penggunaan internet dapat mencakup semua usia, dari kalangan kanak-kanak sampai dewasa. Begitu pula dengan dunia pendidikan, *internet* telah menjadi salah satu fasilitator utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada institusi-institusi pendidikan di seluruh penjuru dunia (Sherlyanita & Rakhmawati, 2012, hlm. 17). Digitalisasi secara positif memberikan berbagai akses kemudahan dalam mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Melihat fenomena tersebut, seharusnya sumber daya manusia yang lahir dari sistem pendidikan nasional secara tidak langsung dituntut untuk menguasai berbagai alat maupun perangkat lunak teknologi informasi mengingat perangkat keras dan perangkat lunak tersebut sebagai fondasi dari berjalannya sebuah teknologi informasi.

Perkembangan yang lebih baru, internet tidak hanya digunakan untuk keperluan edukasi dan komersial saja, bahkan fungsinya sudah berkembang untuk keperluan fungsi komunikasi yang sering disebut media sosial. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar teknologi *Web 2.0* dan mendukung penciptaan serta pertukaran *user generated content*, juga memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi dalam komunikasi dan dikemas dalam bentuk beragam, baik blog, jejaring sosial, wiki, forum dan lain-lain (Kaplan & Haenlein, 2010). Oleh sebab itu, adanya internet dengan berbagai fitur-fiturnya termasuk sosial media adalah suatu hal yang juga harus dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan juga termasuk *Resource Center* yang nampak belum optimal memberikan peran pada kegunaan internet lebih luas. Meskipun tidak menjadi kewajiban, akan tetapi potensi dari digitalisasi pada era sekarang ini sudah menjadi hal positif guna memajukan pengurusan lembaga. Padahal di beberapa daerah dan bidang kerja kementerian pusat di Indonesia, akun-akun media sosial mulai digunakan untuk kebutuhan sosialisasi maupun menangkap aspirasi masyarakat lebih luas dan lebih dekat.

Pentingnya *support system* dalam implementasi pendidikan inklusi memberikan gambaran terkait kompleksitas yang dihadapi pengembang dan pengimplementasi pendidikan inklusif itu sendiri. Menurut Balai Pelatihan Guru Sekolah Luar Biasa (BPG SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2008:16-17) menjelaskan hasil *monitoring* dan evaluasi antara lain: (1) masih kurang dukungan dari kepala sekolah; (2) kurang tersedianya aksesibilitas fisik bagi ABK; (3) kurang berperannya SLB sebagai *resource center* (pusat sumber); dan (4) belum adanya perubahan sistem evaluasi sesuai dengan kondisi ABK. Keterkaitan berbagai pihak yang nampak belum adanya sinkronisasi pada implementasi di lapangan memberikan tanda bahwa harus segera ada bentuk evaluasi program yang segera dilakukan. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan program, kemudian diambil suatu keputusan apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, 2014 :18). Jadi apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah studi evaluatif deskriptif pada layanan *Resource Center* di Kota Bandung. Kota Bandung adalah salah satu kota besar dan terkenal dengan kemajuan pembangunannya serta memiliki perhatian yang baik terhadap pendidikan termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dikutip dari Regional.kompas.com (26/10/2015) bahwa walikota Bandung wajibkan tiap sekolah menerima anak berkebutuhan khusus dan dari laman Bandungberita.com (1/12/2016) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung penerapan sekolah Inklusi di Jawa Barat dan akan mendorong diwajibkannya sekolah menggunakan sistem Inklusif. Penelitian ini akan difokuskan pada jenjang sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Model evaluasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah CIPP (*Context*

Irfan Pratama, 2019

STUDI EVALUATIF TERHADAP PROGRAM RESOURCE CENTER DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

evaluatin, input evaluation, process evaluation and product evaluation) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di *Ohio State University*. Evaluasi model CIPP dipilih karena merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi ini dipakai secara meluas diseluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin ilmu dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembang dan masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam mengenai studi evaluatif terhadap program *Resource Center* dalam memberikan dukungan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Aktifitas evaluasi akan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation*). Penelitian ini dilakukan di 3 *Resource Center* yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai perluasan fungsi Sekolah Luar Biasa dalam implementasi pendidikan inklusif. Masing-masing dari *Resource Center* tersebut adalah *Resource Center* Bandung, *Resource Center* Sukapura dan *Resource Center* Cicendo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, berikut ini beberapa pertanyaan penelitian yang merupakan sub rumusan masalah penelitian ini dan beberapa hal yang akan dideskripsikan untuk masing– masing pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut selanjutnya diuraikan dalam rumusan sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimanakah hasil evaluasi konteks (*Context evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung?
- 1.3.2 Bagaimanakah hasil evaluasi masukan (*Input evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung?

1.3.3 Bagaimanakah hasil evaluasi proses (*process evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung?

1.3.4 Bagaimanakah hasil evaluasi produk (*product evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam dan mengetahui bagaimana implementasi program *Resource Center* dalam mengoptimalkan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan Inklusif kota Bandung. Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah merumuskan hasil berupa evaluasi program *Resource Center* dalam memberikan dukungan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Khusus

1.4.2.1 Untuk menggambarkan secara detail hasil evaluasi kontek (*Context evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung.

2.4.2.1 Untuk menggambarkan secara detail hasil evaluasi masukan (*Input evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung.

3.4.2.1 Untuk menggambarkan secara detail hasil evaluasi proses (*Process evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung.

4.4.2.1 Untuk menggambarkan secara detail hasil evaluasi produk (*product evaluation*) pada *Resource Center* di Kota Bandung?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis hasil penelitian :

1.5.1 Secara Teoretis

Irfan Pratama, 2019

STUDI EVALUATIF TERHADAP PROGRAM RESOURCE CENTER DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peneliti berharap dalam penelitian ini menambah kajian teoritis mengenai evaluasi program *Resource Center* dalam implementasi pendidikan inklusif.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan panduan bagi pelayanan *Resource Center* dalam mengoptimalkan perannya dalam mendukung pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

1.5.2.2 Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan evaluasi bagi pemerintah dan dinas terkait mengenai penyelenggaraan lembaga *Resource Center* yang sudah berjalan berkaitan dengan akomodasi yang sesuai.

1.5.2.3 Peneliti berharap dengan penelitian ini memberikan dukungan dan evaluasi bagi *Resource Center* dalam mengelola berbagai potensi untuk mengembangkan lembaganya agar lebih baik.